

SISTEM POLITIK PERADILAN INDONESIA, HAKIM, DAN KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

by Nurhasan, S.h., M.h. -

Submission date: 04-Aug-2021 01:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 1627607008

File name: Jurnal_Litigasi-Edisi_Vol_9_No_3_Oktober_2008-Nurhasan.pdf (195.15K)

Word count: 3986

Character count: 26461

SISTEM POLITIK PERADILAN INDONESIA, HAKIM, DAN KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Oleh:
Nurhasan¹

Abstrak

Forms important ideal judge character done to realize prestigious jurisdiction institute, professional, and parties to public sense of justice. as integral part of effort realizes body politic building dreamed of reinforcement of ashamed culture among judge is believed able to beginning of ideal judge character forming process, jurisdiction is clean, prestigious, professional, and with justice can only be realized by the judges that is with character as ideal judge. Public ca stand is active in assisting forming of ideal judge character by the way of keeping away all thing potencies to lure believe of the judges. System recruitment judge candidate and education system and training of judge candidate, need to be re-studied to get better system. Just internal control doesn't be adequate, and so needs reinforcement the role and function of Komisi Yudisial assisted by whole nation component to execute observation of eksternal which is effective to performance of the judges.

Kata kunci: Hakim, hukum, ideal, keadilan, metode, peradilan, politik, proses.

A. PENDAHULUAN

Untuk mendapatkan Hakim ideal memang tidaklah mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin mendapatkannya. Optimisme untuk mendapatkannya perlu dibangun dibarengi ikhtiar maksimal lahir dan batin dengan semangat pantang menyerah. Optimisme tersebut bukan tanpa dasar, karena sesungguhnya kita telah memiliki contoh sosok manusia ideal, yaitu Nabi Muhammad S.A.W. yang mendapat pengakuan langsung dari Allah S.W.T. sebagai contoh terbaik bagi umat manusia. Fakta tersebut membuktikan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang ideal bukan hal yang mustahil. Pada akhirnya terpulang kepada kita, apakah kita bersungguh-sungguh untuk memperbanyak Hakim yang berkarakter ideal?

Untuk mendapatkan gelar sebagai "contoh terbaik", proses yang dilalui oleh Nabi Muhammad S.A.W. tidaklah sebentar dan tidaklah mudah. Dari proses tersebut mengandung makna bahwa karakter ideal itu tidak diciptakan serta merta, melainkan dibentuk secara terus menerus dan konsisten. Artinya, Allah S.W.T. telah menggunakan metode tertentu yang diterapkan secara terus menerus dan konsisten hingga di dalam diri Nabi Muhammad S.A.W. mengkristal sifat-sifat ideal yang dapat dijadikan sebagai standardisasi (standar minimal) bagi umat manusia jika berkehendak untuk meraih derajat tertinggi.

Ketika metode tertentu telah dipilih untuk diterapkan, maka dalam menerapkannya harus taat asas dan taat hukum, sebagaimana Allah S.W.T. senantiasa konsisten terhadap asas-asas dan hukum-hukum yang telah ditentukannya. Sebagai contoh, Allah S.W.T. konsisten dalam mentaati asas pembelajaran dan hukum proses yang telah ditentukannya, bahwa untuk mengetahui sesuatu itu perlu belajar, dan untuk belajar itu perlu proses, serta untuk sampai pada efektivitas perlu metode yang tepat.

Walaupun Allah S.W.T. maha kuasa untuk menjadikan sesuatu secara serta merta, namun jika diperhatikan dengan seksama bagaimana Allah S.W.T. membentuk dan mengurus dunia dan isinya, tidak pernah melakukannya secara serta merta. Ketika Allah S.W.T.

¹ Dosen Fakultas Hukum Unpas

berkehendak membentuk pribadi Nabi Muhammad S.A.W. sebagai "contoh terbaik", maka dalam mewujudkannya dilakukan dengan s¹⁹entaati asas pembelajaran dan hukum proses. Kepribadian yang sempurna yang melekat di dalam diri Nabi Muhammad S.A.W. dibentuk melalui pembelajaran dengan beragam metode yang ketika hal tersebut diterapkan menjadi rangkaian proses yang terus menerus dan konsisten. Hasil akhir s²⁸ari ikhtiar dan/atau kerja keras tersebut tidak perlu diragukan lagi, terbentuklah pribadi Nabi Muhammad S.A.W. sebagai "contoh terbaik" bagi umat manusia.

Belajar dari asas pembelajaran dan hukum proses yang diterapkan oleh Allah S.W.T. tersebut, penulis termasuk yang memiliki optimisme bahwa sosok Hakim yang berkarakter ideal itu bisa dibentuk dan jumlahnya bisa dilipatgandakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Hakim ideal sulit ditemukan, bagaimana metode yang tepat untuk memperbanyaknya, dan hubungannya dengan sistem politik peradilan Indonesia. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis.

B. PEMBAHASAN

Sistem Politik Peradilan Indonesia

Idealisme sistem peradilan sebagai salah satu pilar bangunan Negara Hukum seharusnya berkarakter bebas dan mandiri dari segala bentuk intervensi internal maupun eksternal, namun dalam tataran pelaksanaannya seringkali mendapat hambatan, tantangan, dan godaan yang tidak kecil sehingga dapat berpotensi 25²⁵lemahkan dan bahkan menghilangkan idealismenya. Adanya bentuk intervensi tersebut tidak dapat dilepaskan dari pola hubungan antara hukum dan politik.

Hukum dan Politik merupakan dua aspek kehidupan yang memiliki 16¹⁶sifat berbeda tetapi di antara keduanya saling membutuhkan, sehingga muncul adagium bahwa hukum tanpa politik adalah angan-angan (khayal) dan politik tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan (chaos). Artinya, hukum membutuhkan peran politik supaya apa yang menjadi tujuan hukum (ketertiban, kedamaian, keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan) dapat diwujudkan, demikian juga politik membutuhkan peran hukum supaya dalam melakukan berbagai cara (metode) untuk mencapai suatu tujuan tertentu dapat dilakukan dalam situasi yang tertib dan teratur.

Untuk mengetahui bagaimana sistem politik memengaruhi sistem hukum, dapat dilihat dari pembentukan pemikiran (*mindset*) dan arus utama (*mainstream*) ketatanegaraan Indonesia yang tekstual maupun kontekstual.

Mindset ketatanegaraan Indonesia yang bersifat tekstual, meliputi:

1. Sistem ketatanegaraan (*Constitutional system*);
2. Birokrasi pemerintahan (*Government bureaucratic*);
3. Substansi hukum (*Legal substance*);
4. Kemauan politik (*Political will*).

Mindset ketatanegaraan Indonesia yang bersifat kontekstual, meliputi:

1. Budaya pemerintahan (*Government culture*);
2. Budaya politik (*Politic culture*);
3. Budaya hukum (*Legal culture*);
4. Budaya lembaga peradilan (*Court institution culture*).

Mainstream ketatanegaraan Indonesia pada fase permulaan, meliputi :

1. Situasi urgensi (*Chaos theory*);
2. Prinsip petisi bersama (*Petitio principle*);
3. Pusat interelasi (*Ceteris Paribus*);
4. Imputasi hukum (*Deterministic causality*).

Mainstream ketatanegaraan Indonesia pada fase akhir, meliputi :

1. Segregasi hukum secara ironis (*Desuetude*);

2. Pendapat yang mendesak (*Opinio necessitates*);
3. Tidak berdaya paksa (*Non repressive power*);
4. Konvensi konsensus publik (*Politics convention statement*).

Arus utama (*mainstream*) dapat diartikan sebagai cara pandang eksistensi sebuah kekuasaan pemerintah, khususnya untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan secara politis, sehubungan dengan hal-hal yang mempunyai nuansa terselubung terhadap kasus-kasus atau suatu peristiwa konkret yang terjadi dalam ruang lingkup otoritas kekuasaan pemerintah. Konteksnya adalah penyalahgunaan hak dan wewenang yang hakikatnya menimbulkan opini publik dalam masyarakat.

Banyak kasus yang mencuat ke permukaan, baik itu korupsi, kolusi, isu penggunaan hak dan wewenang yang bertentangan dengan hukum, seperti kasus penyelewengan dana KPU, dana BLBI, kenaikan harga BBM, berbagai kasus yang melibatkan anggota DPR, simpanan pencucian uang di lima belas rekening petinggi POLRI, kasus Pak Harto, dan lain-lain, hanya menggigit di awalnya saja, dan berakhir dengan pengalihan perhatian dari satu kasus ke kasus lainnya untuk menutupi isu lainnya yang terkait dengan kepentingan politik.

Ideologi (Pancasila) sebagai salah satu sumber hukum, di balik karakteristiknya yang abstrak terbesit suatu tujuan tertentu dan bermuatan kepentingan politis yang didesain menurut kehendak politik dari para pendiri negara (*founding fathers*). Bandingkan beberapa tipologi hukum berikut:

1. Tipologi Hukum Era Orde Lama (1945 – 1965)

Karakteristik hukum Orla bertitik pangkal dari motifnya yang bersifat kolonial (ortodoks feodalistik) karena diadopsi dari kodifikasi hukum Belanda (*Civil Law*) Eropa Kontinental dengan patron klien Canonik Scolastic (Stoanisme) sebagai keputusan atau titah Rajani atau firman Tuhan (*The King can do no wrong*). Jadi barangsiapa melawan titah Raja sama saja melawan titah Tuhan atau lebih pada titik sentral kekuasaan presidensil murni pada seorang pimpinan kharismatik (otoriter).

2. Tipologi Hukum Era Orde Baru (1966 – 1998)

Karakteristik hukum Orba bertitik pangkal dari sifatnya yang monoloyalitas, otoriter militeristik, yang juga masih berpusat pada kekuasaan penguasa di atas segalanya, motif hukum berbentuk feodalistik dengan patron klien (inkrementalis konvensional), konsentrasi kekuasaan pada Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, sehingga fungsi legislatif impoten karena tunduk pada satu kebijakan paternalistik (militeristik totaliter).

3. Tipologi Hukum Era Orde Reformasi (1998 – 2005)

Karakteristik hukum Orde Reformasi bersifat variatif transisional antara hukum Orla dan Orba (Presidensil dan Parlementer) bermotif check and balances dan bermuara ke sistem bikameral sehingga terjadi semacam *legal catastrophe* (kekacauan hukum) yang sangat *equivocal* akibat retorika eufemisme bahasa yang esoterisme sehingga cenderung mempunyai tujuan sinkretisme dan idiotisme dan bersifat hilang arah (*vertigeous*) akibat pengaruh dari kedua tipologi hukum Orla dan Orba.

Ekses dari hubungan antara hukum dan kekuasaan (politik) telah melahirkan kejahatan terselubung dan terorganisasi (*the hiding organized crime*) yang sulit dideteksi karena sifatnyanya sporadis dan melihat situasi dan kondisi siapa yang dihadapinya. Beberapa contoh konkret sebagai berikut :

1. Kasus KKN di Mahkamah Agung RI (MARI) tahun 1995 dalam kasus Ram Gulumul (Gandhi Memorial School) yang mengakibatkan pengunduran diri Hakim Agung Andi Andojo Soetjipto dari jabatannya karena tidak menyetujui putusan MARI yang dinilai tidak adil untuk melepaskan tersangka Ram Gulumul dari jerat hukum.

2. Kasus pengunduran diri Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Amiruddin Zakaria setelah mengadili Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung, akibat dominasi intervensi politik terhadap hukum.

Membangun Sistem Peradilan Yang Berwibawa

Negara Indonesia adalah negara hukum, dan oleh karenanya asas-asas Negara hukum harus mampu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara³. Secara konstitusional eksistensi negara hukum ditandai dengan diakuinya asas-asas : 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia; 2) Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan yang tidak memihak; dan 3) Kualitas hukum dalam segala bentuknya.

Dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia, ternyata masalah terbesar adalah penegakannya, dan usaha ke arah tersebut terlihat banyak dilakukan, kendati umumnya masih bersifat parsial. Dari usaha itu yang terpenting adalah semangat dan komitmen membangun sistem dan penegakan hukum, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan skala prioritas sesuai tuntutan perkembangan realita. Prioritas tersebut yakni membenahi sistem dan lembaga peradilan sebagai pilar utama pemberi keadilan bagi masyarakat, dan hakim merupakan ujung tombak bagi pelaksanaannya.

Realita yang ada menunjukkan upaya pembangunan sistem peradilan yang berwibawa merupakan tantangan utama yang harus diwujudkan. Reformasi mengagendakan aspek ini terlebih gencarnya tuntutan atas kinerja institusi peradilan yang semakin lama semakin merosot. Praktek KKN atau mafia peradilan menjadi dilema yang memprihatinkan, dan kondisi ini membawa implikasi yang multi dimensional, bahkan tuntutan atas kondisi ini ternyata disuarakan baik dari lingkungan dalam maupun luar peradilan.

Masalah penegakan sistem peradilan tentu tidak dapat didekati secara parsial, karena ia meliputi banyak elemen terkait yang sangat luas, setidaknya tidaknya menyangkut : 1) Kualitas individual (SDM) terutama hakim; 2) Kualitas kelembagaan terutama manajemennya; 3) Sarana dan prasarananya; 4) Piranti perundang-undangan; 5) Budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat; dan 6) Hubungan dengan institusi terkait.

Jadi sistem peradilan merupakan sinergitas atas kinerja insan penegak hukum (Polisi, Jaksa, Advokat, Hakim) dan segala daya dukungnya, yang menyatu dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Kendati demikian tumpuan utamanya berada pada pundak para hakim, dan hal inilah yang menjadi sasaran keberadaan Komisi Yudisial yang diamanatkan oleh UUD 1945 untuk menjalankan peranan pengawasan eksternal terhadap kinerja hakim.

Berkaitan dengan hal diatas, maka kelemahan SDM (hakim) harus mampu dieliminir misalnya dengan menerapkan sistem peradilan terpadu dalam bentuk *performance indicator* yang terukur, misalnya dalam peradilan pidana seperti : 1) *Crime rate* yang rendah; 2) *Clearence rate* yang tinggi; 3) *Conviction rate* yang tinggi; 4) *Reconviction rate* yang rendah; 5) *Public participation* yang tinggi; dan 6) *Integrated education* antar penegak hukum terutama untuk meminimalkan disparitas dan menyamakan visi dan misi serta persepsi tentang supremasi hukum.

Disisi lain hal-hal yang memberi kesan berbau KKN, tidak profesional, koordinasi lintas sektoral, petunjuk dan surat sakti dengan dalih apapun harus dapat segera diakhiri, dan untuk kepentingan itu harus segera diwujudkan berbagai usaha mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Menjawab Isu Aktual

- Tingkat kepercayaan pada lembaga peradilan (hakim) yang rendah sebagai akibat pelaksanaan pelayanan tidak optimal, perlakuan diskriminatif dan hanya berpihak pada pemilik kekuasaan / uang.
- Profesionalitas rendah tercermin pada perilaku penegak hukum (hakim) yang mempermainkan sistem peradilan, dengan cara mempersulit apa yang sesungguhnya mudah dan mempermudah yang sebenarnya memerlukan ekstra hati-hati dan ketelitian, yang pada gilirannya berimbas pada persaingan karir / promosi jabatan hakim yang tidak sehat hanya untuk mendapatkan tempat yang penuh dengan aktifitas bisnis perkara (daerah basah).
- Arah sistem hukum nasional yang tidak mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang yang berpengaruh pada timpangnya tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat.
- Realitas standar minimum penghasilan hakim rendah yang berpotensi makin maraknya kenakalan hakim yang terselubung oleh sistem manajemen/-administrasi peradilan yang tidak transparan dan *accountable*.
- Opini publik yang kadangkala bermuatan kepentingan tertentu seperti bertumpuknya berkas perkara tertunda terutama pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung) yang sering kali harus berhadapan dengan kinerja hakim yang rendah dengan mengutamakan perkara dengan tingkat nilai tertentu.
- Keadilan dan kepastian hukum yang sulit diperoleh dan walaupun bisa berbuntut pada prosedur yang berbelit dan biaya yang mahal.
- Mafia peradilan yang sepertinya telah mampu menggerogoti, mencengkram pada semua lini badan penegakan hukum yang bermuara pada lemahnya daya tahan dan jati diri para hakim.

Karakter Ideal Yang Harus Dimiliki Hakim

5

Sejalan dengan pemaparan di atas bahwa Nabi Muhammad S.A.W. sebagai contoh terbaik bagi umat manusia, maka karakter yang perlu dicontoh dan tertanam kuat di dalam pribadi para hakim tentunya karakter Nabi Muhammad S.A.W., diantaranya :

- As-Shidiq (*Integrity*), yaitu memiliki integritas pada tegaknya kebenaran, keadilan dan kejujuran yang tinggi.
- Al-Amanah (*Accountability*), yaitu memiliki tanggung jawab yang tinggi dan dapat dipercaya.
- Fathonah (*Competency*), yaitu memiliki kompetensi keilmuan (hukum) yang mendalam dan berkualitas, serta memiliki keterampilan dan keikhlasan dalam menjalankan profesi sebagai hakim.
- Tabligh (*Transparency*), yaitu memiliki kemampuan membangun transparansi dan/atau keterbukaan untuk menghindari fitnah.

Selain dari itu, ada beberapa karakter warisan leluhur bangsa Indonesia yang ditemukan di dalam Soempah Palapa Gadjah Mada yang dikenal sebagai Limolas Dharma Pasamo, yang perlu dicontoh dan tertanam kuat di dalam pribadi para hakim, yaitu :

- **1** ijtina Yayistri Pratiniata, yaitu sifat bijaksana yang khidmat, mencerminkan rasa tabah, rendah hati, tidak takabur, tidak sombong, tidak putus asa, tidak lupa diri, dan rasa bersahaja yang seimbang.
- Mantriwirja, yaitu sifat sebagai pembela bagi yang tertindas, penolong **1** bagi yang teraniaya, berani karena benar, dan takut karena salah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.
- Witjaksaneng Naja, yaitu sifat demokratis dan patriotik.
- Matangwan, yaitu sifat dapat dipercaya.
- Wigniwag, yaitu sifat berwibawa, teguh dalam prinsip, berani mengambil prakarsa, dan **tuntas** dalam mengerjakan suatu pekerjaan.

- Dirotshabha, yaitu sikap kesatria, intensif dan tekun dalam segala hal, serta tidak mudah goyah kepribadiannya.
- Thanlalano, yaitu sikap polos dalam suka dan duka, senantiasa berwajah cerah ceria, tidak lari dari kenyataan, dan selalu waspada.
- Thansatrinsa, yaitu sikap tidak memihak, tidak pilih kasih, tidak pandang bulu, dan badjiksana sebagai sikap tertinggi dalam menegakkan kebenaran.
- Dhiwignjattijpta, yaitu sikap sopan santun, berbudaya dan berbudi luhur.
- Sih Shamastha Bhoeaera, yaitu berjiwa pahlawan dan negarawan.
- Ghinong Prhatitdiya, yaitu memiliki moralitas yang tinggi.
- Soemantrhi, yaitu sikap sederhana, sadar, setia, teguh, bulat, utuh, sebagai perpaduan loyalitas, dedikasi, kreativitas, dinamis, dan integritas.
- Hanjaken Moesoeh, yaitu sikap mengetahui sesuatu dengan jelas dan berkemampuan mengendalikannya.

Membenahi Lembaga Peradilan

Upaya melakukan pembenahan lembaga peradilan sering dianekdotkan dengan mengurai benang kusut, tetapi komitmen untuk mewujudkannya adalah sebuah keniscayaan. Pembenahan itu harus dilakukan secara komprehensif meliputi seluruh lingkungan peradilan, karena persoalan buruknya citra peradilan memang sudah menjadi ungkapan keseharian masyarakat, terutama atas ketidakpuasan masyarakat pencari keadilan. Indikasi mafia peradilan, KKN, KUHP (kasih uang habis perkara), diskriminasi (keberpihakan) pada penguasa, tidak transparan, perkara undur-undur, peradilan dagelan, dan lain-lain, merupakan sesuatu yang tidak asing didengar, dilihat bahkan diikuti, dan unjuk rasa, orasi terbuka, resolusi, debat dan dialog, eksaminasi publik, adalah cerminan atas realitasnya dan seolah tidak lagi diperlukan proses pembuktian.

Jadi nampak bahwa benang kusut sulit untuk diurai sehingga harus ada upaya menggantinya dengan benang baru yang bersih, dan benang itu adalah hakim untuk semua tingkatan peradilan. Langkah tersebut sangat penting dilaksanakan, oleh karena realita menunjukkan bahwa praktek korupsi peradilan telah meluas, melibatkan hampir seluruh aparat penegak hukum (peradilan) mulai dari tukang parkir, pegawai administrasi, juru sita, panitera pengganti, panitera kepala, hingga hakimnya.

Tanggung Jawab Hakim

Pada dasarnya tanggung jawab hakim dalam sistem peradilan di Indonesia sangat banyak tergantung pada posisi dan fungsinya. *Performance* hakim sebagai pejabat negara sungguh pun belum nampak, tetapi dengan kendali dan pembinaan hakim di bawah satu atap (Mahkamah Agung) telah memberi jalan bagi penciptaan profil hakim dengan integritas moral yang tinggi dan terpisah secara tegas dari fungsi kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan lainnya.

Sebagai pejabat Negara, maka alat ukurnya adalah integritas moral yang kuat, komitmen pribadi yang tangguh, keberpihakan kepada keadilan, dan naluri kejujuran, kejujuran, kewibawaan dan juga didukung oleh intelektualitas yang mumpuni menjadi bagian dari sosok individual *performance* hakim.

Dalam konteks inilah sebenarnya kontribusi hakim atas kinerjanya diharapkan bermuara pada terciptanya penyelenggaraan pemerintahan (dalam arti luas) yang *Good Governance* sungguh pun harus diakui bahwa hakim tidak berada disuatu ruang kosong tetapi adalah dikelilingi oleh seperangkat lembaga kekuasaan lainnya bahkan masyarakat luas yang senantiasa memantau dan mengevaluasi terhadap kinerjanya.

Jadi pada era reformasi pengangkatan hakim pada semua tingkatan, harus diukur dari tingkat kecenderungannya untuk mengemban tanggungjawab mulia sebagai negarawan,

sehingga ia tidak boleh tercela dimata masyarakat, tentu diikuti indikator lainnya, karena bagaimanapun tugas hakim adalah memberi putusan tentang keadilan. Karena itulah kekuasaan yang demikian besar dan mulia harus diimbangi dengan sikap yang penuh rasa tanggungjawab baik kepada hati nuraninya sendiri, negara, masyarakat dan kepada Tuhan YME.

Peranan Komisi Yudisial

22

Terbentuk dan berfungsinya Komisi Yudisial berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004 menjadi barometer bagi tegaknya sistem peradilan yang baik dan terpuji, serta menjadikan hakim sebagai instrumen penegakan hukum yang profesional dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui kinerja hakim yang optimal dan efektif, maka untuk hal tersebut perlu ditetapkan sarannya, misalnya :

- Tumbuh dan berkembangnya sikap kemandirian dan kenegarawanan dari dalam diri setiap hakim, melalui peningkatan profesionalitas, integritas diri, kejujuran, kecerdasan serta produktifitas kinerjanya.
- Membangun *performance* hakim sebagai manusia yang berkualitas dalam pengertian tidak pernah tercela dan berwawasan luas sebagai kekuatan dinamis yang memungkinkan melahirkan berbagai putusan yang berkeadilan.
- Mewujudkan citra hakim yang baik dan terpercaya sehingga menjadi dasar bagi kembalinya kepercayaan masyarakat (dalam / luar negeri) atas sistem peradilan di negara Indonesia. Untuk itu perlu dipenuhi beberapa syarat diantaranya : SDM yang mampu bertindak profesional dengan memperhatikan norma-norma kode etik profesi, menghilangkan aspek keterikatan fungsional, memiliki kemampuan untuk bertindak obyektif dan tidak membuat ruang kelemahan dan kerawanan, serta juga tidak kalah pentingnya memiliki daya tahan diri.
- Mengembangkan nilai-nilai keadilan dan keberadaban melalui bingkai demokrasi yang dapat diselenggarakan secara transparan dan senantiasa harus dipertanggungjawabkan.

Kategorisasi Hakim Dalam Praktek

Dalam komunitas para advokat yang dalam menjalankan profesinya sering bersinggungan dengan profesi hakim, biasa mengelompokkan hakim ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- Hakim Ring 1, yaitu hakim yang dapat dikatakan berkarakter sebagai hakim ideal, biasanya ia sulit bahkan tidak bisa dihubungi oleh pihak-pihak dalam perkara yang sedang ditanganinya, ia lebih mengutamakan sukses dalam karir, umumnya bercita-cita ingin jadi Hakim Agung, pasti tidak bisa disuap, sikapnya ramah tetapi tegas, rajin/taat beribadah, obyektif dalam merumuskan pertimbangan hukum, mandiri dalam memutus perkara, jujur, serta bersahaja dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- Hakim Ring 2, yaitu hakim yang pada dasarnya berkarakter baik, tetapi belum dapat dikatakan ideal, tidak berani "bermain" dengan pihak dalam perkara yang kedudukan hukumnya lemah, tetapi jika dikehendaki masih membuka peluang kepada pihak dalam perkara yang kedudukan hukumnya kuat untuk lebih memperkuat kedudukan hukumnya sehingga optimistis dapat memenangkan perkara, umumnya tidak bercita-cita menjadi Hakim Agung, menyukai kehidupan yang mewah dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar, relatif obyektif dalam merumuskan pertimbangan hukum, relatif mandiri dalam memutus perkara, relatif jujur.
- Hakim Ring 3, yaitu hakim yang oleh masyarakat pada umumnya sering disebut sebagai hakim nakal, masih bisa disuap oleh pihak dalam perkara yang kedudukan hukumnya lemah, sangat menyukai kemewahan, relatif jauh dari agama.

Profil Hakim Yang Ideal

Selain karakter yang melekat di dalam diri Nabi Muhammad S.A.W. (shidiq, amanah, fathonah, dan tabligh) ditambah karakter Limolas Dharma Pasamo dari Soempah Palapa Gadjah Mada, para Hakim ideal memiliki juga karakter-karakter di bawah ini :

- Akomodatif, lugas, dan transparan : Dimaksudkan hanya sebatas upaya mendukung terlaksananya pola pengawasan yang sudah berjalan dengan tetap mengedepankan keunggulan tertentu misalnya kinerja hakim yang transparan yang memungkinkan masyarakat (LSM pemerhati penegakan hukum dan masyarakat pada umumnya) melakukan pengawasan sebagai bentuk partisipasi publik secara lebih berkualitas dan fokus.
- Melaksanakan tuntutan standar kinerja minimal hakim : merupakan bagian tidak terpisahkan dari pola penyelenggaraan pemerintahan (dalam arti luas) *Good Governance*, dimana orientasi kinerja diarahkan pada upaya pencapaian target pelayanan publik yang optimal. Misi pelayanan ini merupakan perwujudan dari fungsi hakim sebagai pejabat negara. Aspek-aspek tersebut meliputi: pemberdayaan organisasi profesi hakim, peningkatan SDM dan kompetensi hakim.
- Memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat : Hakim perlu memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan penemuan hukum yang bertumpu pada keadilan dan kemanfaatan hukum, karena hakim dalam menangani suatu perkara harus berpedoman tidak hanya pada pemahaman perumusan sifat melawan hukum yang formil saja, melainkan juga sifat melawan hukum yang materil. Penemuan hukum dapat memperlihatkan kualitas kreativitas hakim dalam mendukung pengembangan konsep-konsep, teori-teori, dan kaidah-kaidah hukum baru yang bersumber dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- Mendukung terwujudnya profil pengadilan yang ideal : Profil pengadilan yang ideal dapat memberikan sebuah deskripsi atas kinerja hakim yang baik dan terpercaya, sehingga perlu didukung dalam upaya mewujudkannya. Jadi, indikator utamanya terletak pada integritas moral hakim dan bukan semata kelembagaannya. Pada kondisi tertentu status demikian dapat dimanfaatkan bagi proses pembinaan hakim. Profil pengadilan yang ideal dapat terselenggara disemua lingkungan peradilan dalam wilayah hukum NKRI, jika para hakim mampu memberi teladan yang dapat diikuti lebih lanjut oleh hakim-hakim lainnya.
- Akomodatif terhadap pola pengawasan hakim yang transparan dan partisipatif : Dimaksudkan hanya sebatas upaya mendukung terlaksananya pola pengawasan yang sudah berjalan dengan tetap mengedepankan keunggulan tertentu misalnya kinerja hakim yang transparan yang memungkinkan masyarakat (LSM pemerhati penegakan hukum dan masyarakat pada umumnya) melakukan pengawasan sebagai bentuk partisipasi publik secara lebih berkualitas dan fokus.
- Meningkatkan integritas moral hakim : Melalui penegakan kode etik profesi hakim serta budaya hukum yang bersih, jujur, dan berwibawa. Persoalan integritas moral hakim sebenarnya menjadi bagian dari penegakan kode etik profesi hakim, hanya saja dalam implementasinya perlu diimbangi dengan penguatan organisasi profesi hakim yang mandiri dan mampu melakukan berbagai tindakan yang memiliki daya ikat. Pada gilirannya bertujuan terciptanya budaya hukum yang bersih, jujur, berwibawa, dan memiliki ketahanan mental sebagai abdi dan pejabat negara.

Penguatan Budaya Malu

Pada hakim sebagai kaidah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai sosial budaya, sehingga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut terjabarkan dalam etika yang melembaga dan kemudian terumuskan dalam beragam norma sebagai dasar pola perilaku.

Rasa malu berbuat yang tidak pantas dan bertentangan dengan norma hukum, kesucilaan, kesopanan, dan agama perlu ditanamkan sekuat-kuatnya dalam kepribadian seorang hakim sehingga menyatu dengan denyut nadi dan membentengi hatinya dari segala bentuk bisikan jahat.

Membudayakan rasa malu jika berbuat yang tidak pantas dan bertentangan dengan norma-norma tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, dan dapat memperkuat pentaatan pada etika profesi hakim. Terjaminnya pentaatan pada etika profesi hakim menjadi modal dasar bagi pentaatan pada norma hukum dan norma sosial lainnya yang kemudian mewujudkan dalam pola perilaku hakim ketika sedang menjalankan tugas profesinya.

C. PENUTUP

Membentuk karakter hakim yang ideal penting dilakukan untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bermartabat, profesional, dan berpihak pada rasa keadilan masyarakat, sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan bangunan negara hukum yang dicita-citakan. Penguatan budaya malu di kalangan hakim diyakini dapat mengawal proses pembentukan karakter hakim yang ideal. Peradilan yang bersih, bermartabat, profesional, dan berkeadilan hanya dapat diwujudkan oleh para hakim yang berkarakter sebagai hakim yang ideal. Masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu pembentukan karakter hakim yang ideal dengan cara menjauhkan segala sesuatu yang berpotensi menggoda iman para hakim. Sistem rekrutmen calon hakim serta sistem pendidikan dan pelatihan calon hakim, perlu dikaji ulang untuk mendapatkan sistem yang lebih baik. Pengawasan internal saja tidak memadai, dan oleh karenanya perlu penguatan peran dan fungsi Komisi Yudisial dibantu oleh segenap komponen bangsa termasuk kalangan Pesantren untuk melaksanakan pengawasan eksternal yang efektif terhadap kinerja para hakim.

Hakim yang berkarakter ideal dibangun dengan pondasi karakter Nabi Muhammad S.A.W. (shidiq, amanah, fathonah, tabligh) dilengkapi dengan Limolas Dharma Pasamo dari Soempah Palapa Gadjah Mada, diyakini dapat menghasilkan pribadi hakim yang paripurna dan berkemampuan melaksanakan tugas menegakkan kebenaran dan keadilan sebagai prasyarat terwujudnya bangunan negara hukum di Indonesia yang dicita-citakan.

Bagi sebuah negara hukum, benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan hanya dapat diperoleh di Pengadilan. Hakim menjadi ujung tombak untuk mewujudkan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat melalui putusan-putusannya. Ada institusi lain yang terkait dalam penegakan sistem peradilan selain hakim, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan para advokat. Tingkat moralitas, ahlak, dan perilaku para penegak hukum (advokat, polisi, jaksa, hakim) menjadi ukuran bagi tegak atau runtuhnya sistem peradilan. Upaya untuk membenahinya haruslah komprehensif dan terpadu.

D. DAFTAR PUSTAKA

- 6 Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, "Uraian Pokok-pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi ke-IV", Masalah-masalah Hukum, Edisi Khusus, FH Undip, 1987.
- Satjipto Rahardjo, *Persoalan Hukum Dalam Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1988.
- Sri Sumantri, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Sebagai Prasarat Negara Hukum Indonesia*, Makalah, UGM, Yogyakarta, 26 Agustus, 1995.

SISTEM POLITIK PERADILAN INDONESIA, HAKIM, DAN KOMISI YUDISIAL DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ylbnusantara.wordpress.com

Internet Source

1%

2

www.scribd.com

Internet Source

1%

3

Submitted to Udayana University

Student Paper

1%

4

pa-sungailiat.pta-babel.net

Internet Source

1%

5

www.goodreads.com

Internet Source

1%

6

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

1%

7

media.neliti.com

Internet Source

<1%

8

lemlit.unpas.ac.id

Internet Source

<1%

arruqy.wordpress.com

9

Internet Source

<1 %

10

fhukum.unpatti.ac.id

Internet Source

<1 %

11

hukumalam.wordpress.com

Internet Source

<1 %

12

www.boyyendratamin.com

Internet Source

<1 %

13

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

14

www.slideshare.net

Internet Source

<1 %

15

aceh.antaranews.com

Internet Source

<1 %

16

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

17

publikasiilmiah.ums.ac.id:8080

Internet Source

<1 %

18

qulamirulhakim.blogspot.com

Internet Source

<1 %

19

shafiehanan.blogspot.com

Internet Source

<1 %

20

achmadnosiutama.blogspot.com

Internet Source

<1 %

21	agussubagyo1978.wordpress.com Internet Source	<1 %
22	docplayer.info Internet Source	<1 %
23	library.uta45jakarta.ac.id Internet Source	<1 %
24	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
25	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
26	winasisyulianto-winasisyulianto.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	www.brightstars.co.id Internet Source	<1 %
28	archive.org Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off